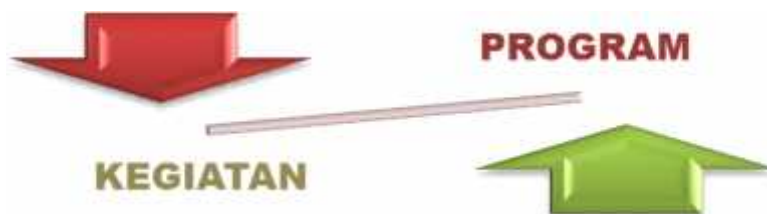




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

RENCANA KERJA
TAHUN 2016

INSPEKTORAT DAERAH



BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Pengolahan data dan Informasi

1. Latar Belakang

Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan arah dan kebijakan startegis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (*APIP*) sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, berbagai masalah yang timbul mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Inspektorat yang diberi tugas dalam mengawasi pelaksanaan atas pembangunan daerah. Peran Inspektorat sebagai *APIP* sangat strategis, karena pengawasan dan evaluasi merupakan tahapan akhir untuk menentukan arah pembangunan daerah.

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*) telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Guna mewujudkan hal tersebut, salah satu kuncinya adalah meningkatkan intensitas, kualitas dan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lembaga pengawas perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara harus semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan dalam mengarahkan proses pembangunan agar berjalan efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka perlu ditetapkan secara sistimatis dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (*Renstra*) Tahun 2014 – 2018 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Landasan Hukum

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No.1 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Keuangan Negara dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844*);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (*Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815*);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (*RPJMN*) 2010-2014.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.
16. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 tentang penggantian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018.

B. Analisa Pelayanan SKPD

1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pemerintahan dan pembangunan desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan.
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Organisasi Inspektorat kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Inspektorat kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan Januari Tahun 2015 didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Profil Sumberdaya Manusia
Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Gol.	Pendidikan							Tota 1
		S-3	S-2	S-1	D- III	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e								
2	IV/d								
3	IV/c								
4	IV/b		2	2					4
5	IV/a			1					1
	Total Gol. IV		2	5					7
1	III/d		1	1					2
2	III/c		1	6					7
3	III/b		1	8					9
4	III/a			6					6
	Total Gol. III		3	21					24
1	II/d								
2	II/c								
3	II/b								
4	II/a								
	Total Gol. II								
1	I/d								
2	I/c								
3	I/b								
4	I/a								
	Total Gol. I								
	TOTAL		5	26					29

Sumber : INSPEKTORAT Kabupaten Minahasa Tenggara, Januari 2016

Tabel 2
Profil Sumberdaya Manusia
Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara
Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

No.	Jabatan	Gol.	Pendidikan				Total
			S-3	S-2	S-1	D-III	
A	STRUKTURAL						
1	Inspektur (Eselon II B)	IV/c			1		1
2	Sekretaris (Eselon III A)	IV/b		1			1
3	Inspektur Pembantu (Eselon III A)	IV/c					
		IV/b		1	3		4
		IV/a					
		III/d					
		III/c					
4	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IV A)	IV/a					
		III/d					
		III/c			2		2
		III/b		1			1
B	FUNGSIONAL						
		IV/a			1		1
		III/d		1	1		2
		III/c			5		5
		III/b			7		7
		III/a			5		5
		II/d					
		II/c					
	Total						29

Sumber : INSPEKTORAT Kabupaten Minahasa Tenggara, Januari 2016

Pelaksanaan Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Tahun Anggaran 2015 ditunjang pula dengan sarana-prasarana dan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2015, sebesar Rp. 2.570.000.000,- yang di peruntukkan guna membiayai program/kegiatan yang menunjang fungsi pengawasan yang di anggarkan lewat belanja langsung.

BAB II
REVIU RENJA TAHUN 2015

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Melaksanakan Pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi unit kerja yang diperiksa	Tersedianya Jasa kantor , jasa Pegawai Tidak Tetap, Alat Listrik, kendaraan yang siap pakai,.	12 Bulan	12 Bulan	100
	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sesuai Dengan Plafon Anggaran	12 Bulan	12 Bulan	100
	Tersedianya Administrasi Barang/Jasa	12 Bulan	12 Bulan	100
	Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	29 Kali	32 Kali	110
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kendaraan Dinas roda dua	2 Unit	2 unit	100
	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit	3 Unit	100
	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	24 Unit	30 Unit	125
	Tersedianya meja kursi meja kantor	9 unit	9 Unit	100
	Terlaksanannya Rehabilitasi Gedung Kantor	1 paket	1 Paket	100
	Tersedianya Kendaraan Dinas siap Pakai	12 Bulan	12 Bulan	100
Meningkatnya disiplin kinerja aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31 Orang	31 Orang	100

Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Aparat Pengawasan yang berkompeten	32 Orang	32 Orang	100
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terselesaikannya RKA 2015	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	Terselesaikannya Renja - SKPD Inspektorat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	Terselesaikannya Lakip - SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	Terlaksananya Laporan Keuangan Pemerintah daerah Yang dilakukan Oleh Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akurat dan akuntabel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
melaksanakan Pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi unit kerja yang diperiksa	tercapainya pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan komprehensif atas dugaan penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Negara	4 Laporan	4 Laporan	100
	Terselesaikannya Kasus Pengaduan Masyarakat	12 Kasus	12 Kasus	100
	Tersedianya data inventarisasi temuan Pengawasan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
	adanya tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100

	optimal			
	Terlaksananya Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
	Tersedianya kebijakan pengawasan dan jadwal pemeriksaan	1 Kali	1 Kali	100
	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten	1 Kali	1 Kali	100
terwujudnya aparatur yang memiliki kemampuan teknis Kepegawaian yang Tinggi	Terlaksananya In House Training Aparat Pengawasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
Rata – Rata Kinerja %				100

BAB III

ISI – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah merubah pola pengawasan dari yang semula bertumpu pada sisi financial audit menjadi performance audit.

Selama ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah oleh APIP terkesan berjalan sendiri-sendiri (*parsial*) dan pelaksanaannya sulit untuk dikoordinasikan, walaupun didalam penyusunan PKPT telah dilakukan upaya koordinasi oleh Kementrian Dalam Negeri. Daerah mengeluhkan terjadinya pembinaan dan pengawasan yang bertubi-tubi oleh berbagai APIP yang menguras waktu dan sumber daya (*resources*) daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh APIP secara umum dan khususnya yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Lemahnya koordinasi dikalangan APIP yang pada gilirannya menimbulkan stigma yang kurang menguntungkan kewibawaan kelembagaan APIP dimata auditan dan masyarakat.
- Kurang didukung dengan Sumber Daya Manusia (*SDM*) dan pembiayaan yang memadai bila dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada.
- Keberadaan APIP yang melekat pada struktur eksekutif yang dapat menghalangi APIP untuk mampu bekerja secara obyektif.
- Kurangnya tenaga fungsional Auditor.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis pengawasan perlu ditingkatkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pengawasan dalam hal ini Inspektorat yang

membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Gambaran Pelaksanaan SKPD : Pelaksanaan Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Ruang lingkup dari PKPT meliputi : 1. Pemeriksaan Reguler 2. Pemeriksaan Non Reguler 3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Kapabilitas APIP masih rendah pada Level I (satu)	- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	- Anggaran Terbatas	- Kalender Diklat BPKP peserta terbatas	- perlunya Peningkatan kapasitas SDM (melalui diklat pembentukan auditor)
			- Perlunya Komitmen/kebijakan KDH untuk mendukung & meningkatkan kapabilitas APIPnya.	- Kurangnya mengikuti Diklat dari BPKP, BPK atau Diklat lainnya	- Standar kompetensi SDM belum terpenuhi
			- Intensitas kinerja internal tinggi, ditambah dengan pendampingan pemeriksaan external non regular dengan terbatasnya SDM tenaga Auditor.	- Intensitas kinerja yang serba cepat	- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan (Anggaran Terbatas)
			- Kurangnya kesadaran Pengembangan diri pada masing-masing auditor.	- Terjadinya mutasi atau promosi / penggantian pejabat atau ASN	- Hard dan soft control atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan
			- Kurangnya mengikuti Diklat dan Bintek		- Temuan yang berulang (seperti Barang daerah, pengadaan barang dan jasa)
					- Sistem Penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam, (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten)
					- Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik

					yang administratif masih lemah
					- Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan
					SOP yang ada tidak ditaati atau tidak berjalan secara optimal.
					- Adanya perubahan regulasi, Format-format yang dikeluarkan dari Menpan RB & Mendagri berbeda
					- Kesulitan reuiu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya
					- Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan
Dasar Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tupoksi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kab. Minahasa Tenggara	IKM	- Kebijakan	- Penyesuaian Perubahan OPD		
Opini BPK atas pemeriksaan : LKPD Th 2013 TW, Th 2014 WDP Th 2015 WTP	- Penyajian LK sesuai Sistim Akuntansi Pemerintah (SAP) - SPI Memadai - Ketaatan terhadap peraturan perundang-	- SDM atau personil pada sub bagian Evaluasi dan Pelaporan masih kurang atau terbatas	- Masih fokus pada pemeriksaaan external karena terkait opini BPK		- Opini BPK atas pemeriksaan LKPD - Rendahnya tindak lanjut atas LHP kabupaten dan LHP Inspektorat Provinsi.

undangan

BAB IV PERUMUSAN

A. VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Visi Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 – 2018 adalah :

“Terwujudnya pengawasan yang handal dan profesional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel

Sasaran :

1. Peningkatan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis ;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal.

Adapun Tujuan dan sasaran Tahun 2016 yang akan di capai sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.	Peningkatan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis	Prosentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindak lanjuti	45
		Prosentase Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti	81
	Peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal	Prosentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai	75

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam pelaksanaan Tujuan di jabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel IV.C

Visi: Terwujudnya pengawasan yang handal dan profesional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik			
Misi : Meningkatkan efektifitas pengawasan internal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.	Peningkatan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis	Menerapkan sistem pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk Tim Tindak Lanjut- Membentuk Tim TPTGR- Membuat Ruang Pengaduan baik lewat Kotakmaupun Informasi Online- Mewujudkan opini BPK WTP- Penandatanganan Pakta Integritas
	Peningkatan kapasitas aparatur pengawas internall	Kerja sama dengan Pusdiklat BPK dan BPKP	<ul style="list-style-type: none">- Membuat Kalender Diklat Pengawasan

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Guna pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditetapkan rencana program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
7. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan
8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan

Adapun rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan-kegiatan prioritas :
 - 1) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - 2) Penyusunan PKPT Kabupaten Minahasa Tenggara
 - 3) Inventarisasi temuan pengawasan
 - 4) Gelar Pengawasan Pemuktahiran Data, Penyusunan PKPT Tingkat Pusat dan Propinsi, Kabupaten/Kota
 - 5) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
 - 6) pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan probity audit pengadaan barang dan jasa
 - 7) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - 8) Pembinaan dan pengawasan terpadu
 - 9) Evaluasi LAKIP/SAKIP
 - 10) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 11) pelaksanaan reformasi birokrasi
 - 12) Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 13) Reviuw RKA
 - 14) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- b. Kegiatan-kegiatan pendukung :
- 1) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
 - 4) Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 5) pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - 6) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 7) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 8) Pengadaan mebeleur
 - 9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 10) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 11) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 12) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 13) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - 14) Penyusunan RKA-SKPD
 - 15) Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD
 - 16) Penyusunan LAKIP-SKPD

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja ini secara tidak langsung telah memberikan suatu gambaran mengenai kinerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara khusus bidang pengawasan selama Tahun Anggaran 2016.

Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara didalam kemajuan mencapai tujuan yang ditetapkan tentunya bukan hanya dilihat pada temuan baik bidang aparatur, aset dan keuangan tetapi harus diukur pula melalui beberapa aspek, karena didasari bahwa dibalik hasil yang ada pastinya ada kekurangan yang disebabkan oleh kekurangmampuan aparatnya (SDM) maupun sistem yang berlaku.

Ratahan, 2016

INSPEKTUR,



Robert J. Rogahang, SE
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19600803 198608 1 002

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	URUSAN WAJIB							
1	20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Inspektorat	100%	405,733,617	DAU	100%	466,593,660
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	tenaga kontrak, materai, ATK, alat kebersihan, Tagiahn Listrik, Tagihan Internet, Pajak Kendaraan, Penggandaan dan Fotocopy Dokumen, tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	Kantor Inspektorat	12 bulan	50,000,000	DAU	12 bulan	57,500,000
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Honor Pengelola Keuangan, ATK, Materai	Kantor Inspektorat	12 bulan	55,000,000	DAU	12 bulan	63,250,000
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Honor Pengelola Barang, ATK, Pemeliharaan Peralatan	Inspektorat	12 bulan	55,000,000	DAU	12 bulan	63,250,000
		Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah sebanyak 85 kali	Kab. Mitra, Prov. Sulut, Nasional	12 bulan	135,733,617	DAU	12 bulan	156,093,660
		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Materai, ATK, Penggandaan dan Fotocopy, Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	Inspektorat, Prov. Sulut	12 bulan	55,000,000	DAU	12 bulan	63,250,000
		Penataan Kearsipan	Materai, ATK, Penggandaan dan Fotocopy	Inspektorat	12 bulan	55,000,000	DAU	12 bulan	63,250,000
1	20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Inspektorat	100%	468,200,000	DAU	100%	538,430,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan roda 2	Inspektorat	2 unit	50,000,000	DAU	2 unit	57,500,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung	Inspektorat	1 kegiatan	82,500,000	DAU	1 kegiatan	94,875,000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	rehabilitasi kantor	Inspektorat	1 kegiatan	23,000,000	DAU	1 kegiatan	26,450,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan kantor	Inspektorat	2 unit	16,500,000	DAU		2 unit	18,975,000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Komputer PC, Laptop, Printer	Inspektorat	8 unit	76,000,000	DAU		8 unit	87,400,000
	Pengadaan Meubelair	Lemari Arsip, Filling Cabinet	Inspektorat	2 unit	22,000,000	DAU		2 unit	25,300,000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pengecatan kantor	Inspektorat	1 kegiatan	18,700,000	DAU		1 kegiatan	21,505,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4	Kab. Mitra, Prov. Sulut	12 bulan	179,500,000	DAU		12 bulan	206,425,000
1	20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kantor Inspektorat	100%	123,200,000	DAU	100%	141,680,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas	Kab. Mitra	35 psng	39,600,000	DAU		35 psng	45,540,000
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Mitra	35 set	28,600,000	DAU		35 set	32,890,000
	Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya	tersedianya pakaian olahraga dan perlengkapan	Kab. Mitra	35 set	24,200,000	DAU		35 set	27,830,000
	Pengadaan Pakaian Korpri	tersedianya pakaian KORPRI	Kab. Mitra	35 set	30,800,000	DAU		35 set	35,420,000
1	20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Inspektorat	100%	165,000,000	DAU	100%	189,750,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mitra, Prov. Sulut, Nasional	15 orang	31 orang	165,000,000	DAU		31 orang	189,750,000
1	20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kantor Inspektorat	100%	382,138,625	DAU	100%	439,459,419
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- SKPD	Dokumen RKA Induk dan Perubahan Inspektorat	Inspektorat	2 dokumen	14,081,980	DAU		2 dokumen	16,194,277
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) - SKPD	Dokumen Renja Inspektorat	Inspektorat	1 dokumen	6,050,000	DAU		1 dokumen	6,957,500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen LAKIP Inspektorat	Inspektorat	1 dokumen	6,050,000	DAU		1 dokumen	6,957,500
	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen laporan evaluasi 16 SKPD	Inspektorat	1 dokumen	46,771,340	DAU		1 dokumen	53,787,041
	Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Dokumen hasil reviu LKIP Pemkab	Inspektorat	1 dokumen	32,565,000	DAU		1 dokumen	37,449,750
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD	Dokumen SPI	Inspektorat	1 dokumen	23,650,660	DAU		1 dokumen	27,198,259
	Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- SKPD Wil I	Dokumen reviu RKA SKPD Wil. I	Inspektorat	2 kegiatan	28,523,690	DAU		2 kegiatan	32,802,244
	Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- SKPD Wil II	Dokumen reviu RKA SKPD Wil. II	Inspektorat	2 kegiatan	28,523,690	DAU		2 kegiatan	32,802,244
	Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- SKPD Wil III	Dokumen reviu RKA SKPD Wil. III	Inspektorat	2 kegiatan	28,523,690	DAU		2 kegiatan	32,802,244
	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dokumen reviu LKPD Pemkab	Ratahan, Manado	1 kegiatan	88,278,575	DAU		1 kegiatan	101,520,361
	Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen evaluasi LKPD Pemkab	Ratahan, Manado	1 kegiatan	32,775,000	DAU		1 kegiatan	37,691,250
	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Dokumen Reviu RKPD	Ratahan, Manado	1 kegiatan	32,775,000	DAU		1 kegiatan	37,691,250
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	Inspektorat	1 dokumen	2,645,000	DAU		1 dokumen	3,041,750
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan keuangan tahunan	Inspektorat	1 dokumen	3,967,500	DAU		1 dokumen	4,562,625
	Penyusunan Standard Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen SPM Inspektorat	Inspektorat	1 dokumen	6,957,500	DAU		1 dokumen	8,001,125

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Instrernal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kantor Inspektorat	100%	2,234,938,538	DAU		100%	2,570,179,319
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Wil I	Dokumen LHP	Kecamatan dan Desa, Kacabdin dan Sekolah, Puskesmas dan Poskesdes, SKPD dan UPTD	4 Kali	327,510,000	DAU		4 Kali	376,636,500
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Wil II	Dokumen LHP	Kecamatan dan Desa, Kacabdin dan Sekolah, Puskesmas dan Poskesdes, SKPD dan UPTD	4 Kali	327,510,000	DAU		4 Kali	376,636,500
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Wil III	Dokumen LHP	Kecamatan dan Desa, Kacabdin dan Sekolah, Puskesmas dan Poskesdes, SKPD dan UPTD	4 Kali	327,510,000	DAU		4 Kali	376,636,500
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Wil I	Dokumen LHP	Kab. Mitra	12 LHP	39,343,725	DAU		12 LHP	45,245,284
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Wil II	Dokumen LHP	Kab. Mitra	12 LHP	39,343,725	DAU		12 LHP	45,245,284
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Wil III	Dokumen LHP	Kab. Mitra	12 LHP	39,343,725	DAU		12 LHP	45,245,284
	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Berkala	Dokumen SK Inspektur tentang Kebijakan Pemeriksaan	Inspektorat	1 dokumen	189,750,000	DAU		1 dokumen	218,212,500
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Dokumen temuan pemeriksaan	Inspektorat	1 dokumen	46,545,675	DAU		1 dokumen	53,527,526

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pemerintah Daerah	terlaksananya sidang M PTP-TGR, adanya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kab. Mitra	7 kegiatan	157,000,000	DAU		7 kegiatan	180,550,000
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan SKPD Wil I	Terlaksanannya Tindak Lanjut Temuan	Kab. Mitra	4 kegiatan	32,500,000	DAU		4 kegiatan	37,375,000
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan SKPD Wil II	Terlaksanannya Tindak Lanjut Temuan	Kab. Mitra	4 kegiatan	32,500,000	DAU		4 kegiatan	37,375,000
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan SKPD Wil III	Terlaksanannya Tindak Lanjut Temuan	Kab. Mitra	4 kegiatan	32,500,000	DAU		4 kegiatan	37,375,000
	Monitoring dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	adanya monitoring hasil pemeriksaan	Kab. Mitra	2 kegiatan	18,543,213	DAU		2 kegiatan	21,324,695
	Gelar Pengawasan Pemuktahiran Data, dan Penyusunan PKPT Tingkat Pusat dan Provinsi, Kabupaten/Kota	terlaksananya pemuktahiran data	Ratahan, Manado, Nasional	1 kegiatan	57,500,000	DAU		1 kegiatan	66,125,000
	Penyusunan PKPT Kabupaten Minahasa Tenggara	Dokumen PKPT Inspektorat	Inspektorat	1 dokumen	17,250,000	DAU		1 dokumen	19,837,500
	Penyusunan SOP Pengawasan	Dokumen SOP Inspektorat	Inspektorat	1 dokumen	36,248,575	DAU		1 dokumen	41,685,861
	Pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sosialisasi Perundang-undangan	Kab. Mitra	2 kegiatan	55,890,000	DAU		2 kegiatan	64,273,500
	Pelaksanaan Probitiy Audit Wil I	Dokumen LHP	Kab. Mitra	1 LHP	14,500,000	DAU		1 LHP	16,675,000
	Pelaksanaan Probitiy Audit Wil II	Dokumen LHP	Kab. Mitra	1 LHP	14,500,000	DAU		1 LHP	16,675,000
	Pelaksanaan Probitiy Audit Wil III	Dokumen LHP	Kab. Mitra	1 LHP	14,500,000	DAU		1 LHP	16,675,000
	Pembinaan dan Pengawasan Terpadu	terlaksanan Inspeksi Mendadak	Kab. Mitra	6 kegiatan	41,975,000	DAU		6 kegiatan	48,271,250
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sosialisasi Perundang-undangan	Kab. Mitra	1 kegiatan	120,539,000	DAU		1 kegiatan	138,619,850
	Penyusunan Database Pengawasan	database hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat	1 kegiatan	78,750,000	DAU		1 kegiatan	90,562,500
	Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Tatakelola Aparat APIP	meningkatkan Level APIP Inspektorat	Kab. Mitra, Prov. Sulut, Nasional	1 kegiatan	86,825,000	DAU		1 kegiatan	99,848,750

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Petunjuk Teknis Bidang Pengawasan	Dokumen SK Inspektur tentang Pedoman Pemeriksaan	Inspektorat	1 dokumen	25,300,000	DAU		1 dokumen	29,095,000
	Pendampingan Penhawasan Eksternal dan Internal	Dokumen	Inspektorat/ Lintas SKPD	4 dokumen	25,760,900	DAU		4 dokumen	29,625,035
	Verifikasi Belanja Barang, Jasa dan Belanja Modal	LHP	Inspektorat/ Lintas SKPD	12 LHP	35,500,000	DAU		12 LHP	40,825,000
	Pelaporan LHKPN Pejabat Negara	LHKPN Pejabat Negara	Inspektorat/ Lintas SKPD	31 LhKpn	75,000,000	DAU		31 LhKpn	86,250,000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan		Kantor Inspektorat	100%	670,972,500	DAU		100%	771,618,375
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	terlaksananya Diklat, Terselenggaranya Diklat	Kab. Mitra, Prov. Sulut, Nasional	31 orang	450,972,500	DAU		31 orang	518,618,375
	Panduan Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Dokumen aksi pencegahan pemberantasan korupsi	Kab. Mitra	1 dokumen	220,000,000	DAU		1 dokumen	253,000,000
1	20	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kantor Inspektorat	100%	66,125,000	DAU	100%	76,043,750
	Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dokumen naskah akademik	Inspektorat	1 dokumen	37,375,000	DAU		1 dokumen	42,981,250
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dokumen naskah akademik	Inspektorat	1 dokumen	28,750,000	DAU		1 dokumen	33,062,500
TOTAL					4,516,308,280			5,193,754,522	